

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan memiliki laporan arus kas. Biasanya, laporan tersebut mencatat sejumlah transaksi yang terjadi baik pengeluaran maupun pendapatan. Laporan ini biasanya disusun secara berurutan dan sistematis.

Peran laporan keuangan dalam sebuah perusahaan sangat penting. Bisa dibayangkan, laporan ini memegang peranan vital dalam mendukung kemajuan sebuah perusahaan. Selain itu, ada manfaat lainnya yang bisa didapat dari adanya laporan tersebut. Manfaatnya tidak hanya untuk memberikan informasi terkait kondisi perusahaan, masih banyak manfaat yang bisa didapat melalui laporan arus kas.

Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban anggaran. Proses pengelolaan keuangan negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel

sebagai bagian dari pelaksanaan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam rangka mendukung perwujudan “*Good Governance*” dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu tujuan pemerintah instansi resmi memberikan pelayanan terbaik kepada semua *stakeholder* dan pengguna lainnya yang terkait dengan instansi itu sendiri. Upaya-upaya dalam meningkatkan layanan ditempuh dengan berbagai cara dan strategi sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan pengguna layanan.

Birokrasi yang dijalankan dari waktu ke waktu secara otomatis harus mengikuti perkembangan tata aturan yang memuat informasi yang layak dan proporsional. Seperti halnya pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II, sebagai tempat penelitian penulis, tata kerja operasionalnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) itu sendiri merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengelola keuangan negara agar terwujudnya “*Good Governance*” dan “*Clean Government*”, karena KPPN merupakan instansi yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan di bidang perbendaharaan kepada satuan kerja yang menjadi mitra kerja.

Selain itu, KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menjalankan sebagian fungsi Kuasa BUN. Ditjen Perbendaharaan sendiri, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 206/PMK.01/2014, adalah salah satu organisasi Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. KPPN memiliki peran yang krusial dan vital dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 169/PMK.01/2012, tugas KPPN adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal 19 PMK nomor 190/PMK.05/2012, disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan informatika dewasa ini untuk mendukung tugas-tugas layanan instansi pemerintah ataupun non pemerintah tidak bisa terlepas dari sistem informasi yang sedang berkembang dalam bentuk informasi akuntansi yang menjadi tuntutan dalam operasional kerja yang efektif, efisien dan akurat.

Pada umumnya sistem informasi yang berkaitan dengan tingkat pelayanan telah banyak digunakan di berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah dengan maksud untuk memberikan berbagai kemudahan di dalam kegiatan. operasional kerja secara efektif, efisien dan akurat. Maka untuk meningkatkan layanan yang profesional, instansi pemerintah dan non pemerintah membutuhkan pembaharuan yang terus-menerus di dalam penggunaan sistem informasi akuntansi.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini sesuai dengan tempat kajian peneliti di instansi pemerintahan, tata kerja operasional yang diharapkan tentu harus sesuai dengan harapan sebagaimana instansi pemerintah tersebut mengelola ruang lingkup tugasnya. Selama ini berbagai perundangan dan peraturan-peraturan yang diberlakukan terus-menerus disempurnakan dimaksudkan untuk bisa memberikan kepuasan kepada pelaksana pengguna kebijakan. Dengan kebijakan yang diberlakukan diharapkan dapat meningkatkan proses operasional kerja pegawai secara efektif, efisien dan akurat serta memberikan kepuasan.

Adapun kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan pengguna dari pegawai terhadap kebijakan sistem informasi akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Upaya pemerintah yang dijalankan tersebut dengan harapan bisa memberikan kepuasan bagi pengguna secara intern dalam menumbuhkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) saat ini menggunakan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai sistem informasi akuntansi. Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. SPAN dikembangkan oleh Direktorat Transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Mengingat peranan KPPN yang sangat penting di dalam pengelolaan kas negara maka perlu adanya suatu sistem pengendalian internal yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelenggaraan dan penyalahgunaan dana.

Dilatarbelakangi kondisi tersebut penulis merasa terdorong untuk mengangkat sebuah topik untuk dituangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalahnya adalah :

Dalam melindungi dan menjamin keakuratan catatan akuntansi kas diperlukan pengendalian internal pengeluaran kas. Dengan pengendalian internal pengeluaran kas yang baik dapat menghindari terjadinya penyelewengan seperti melakukan perubahan laporan atau perhitungan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini adalah :

Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai sistem pengeluaran kas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II Hasil dari tulisan ini akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa laporan Tugas Akhir, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi Diploma III - Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana - Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dengan Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang pengeluaran kas, khususnya tentang Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada KPPN Bandung II.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang bersifat ilmiah dan dapat memberikan kontribusi yang baik berupa informasi serta

menjadi bahan masukan bagi pemerintahan untuk memperbaiki kekurangan yang belum terdapat pada Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas.

1.6 Landasan Teori

Menurut **Sodikin dan Riyono** (2014:87), yang dimaksud dengan kas adalah uang tunai (uang kertas dan uang logam) dan alat-alat pembayaran lainnya yang dapat disamakan dengan uang tunai. Pengertian lain dari segi akuntansi yaitu “kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan”,

Menurut **Munawir, 1983:14** Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas ialah cek yang diterima dari pada pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit yakni simpanan di bank yang dapat diambil kembali “dengan menggunakan cek atau bilyet”.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam jenis survey, karena penulis ingin memperoleh gambaran faktual berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam menganalisis masalah agar hasil evaluasinya dapat menangani situasi atau masalah serupa dalam perencanaan di masa mendatang.

1.7.1 Jenis Penelitian Dan Metode Yang Digunakan

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi suatu kondisi dengan angka-angka yang terdapat dalam pengeluaran kas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk data-data yang ada pada laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu meminta data yang sudah ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.

1.7.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari tingkat eksplanasinya yaitu deskriptif. Deskriptif menurut **Sugiyono** (2012: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

- a) Sumber data primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dan pemerintahan. Sumber data ini diambil langsung dari buku peraturan pemerintahan yang berlaku serta berdasarkan kegiatan langsung yang terjadi pada pemerintahan tersebut.

- b) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari sumber lain atau merupakan kutipan Sumber data ini berupa buku panduan untuk melakukan penelitian dari beberapa penerbit untuk dijadikan pertandingan dalam melaksanakan penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu mengkaji studi lapangan pada objek penelitian dengan teknik:

- a) Observasi, pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian.
- b) Interview, pengumpulan data dengan cara mengajukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c) Analisis data, membandingkan antara teori yang diperoleh dari studi didapatkan di lapangan.kepustakaan dengan fakta yang.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur, naskah dan buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan referensi atau pengertian secara teoritis yang akan digunakan dalam pemecahan masalah.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Menurut **Miles dan Huberman (1984)**, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

1.8 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II, yang berlokasi di Gedung KPPN Bandung II Jalan PHH Mustofa No.37 Bandung. Adapun Waktu Penelitian dilakukan di bulan Maret – Juni 2021

